

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MANDIRAJA
TAHUN 2024
(PENYELARASAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.
 29. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.
 30. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.875.495.441,00. dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.875.495.441,00.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.949.915.706,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Administrasi Umum, dengan Sub Kegiatan

Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya aplikasi kependudukan online yang dapat diakses oleh semua warga masyarakat yang membutuhkan data Kependudukan. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya pemohon untuk pelayanan KTP dan KK.
2. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam hal administrasi sehingga pelayanan perijinan seperti dispensasi nikah, surat-surat keterangan menurun, sehingga ke depan target capaian kinerja untuk kegiatan tersebut perlu diselaraskan kembali.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SKM		84,32	83,34	80,58	96,68%	84,35	249,3	62,3%
		Nilai SAKIP		CC	CC	CC	CC	B	CC	CC
		Presentase SPPT PBB yg tersalur kan ke Wajib Pajak		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keselarasan dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun		7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan		14 orang	14 orang	14 orang	100%	14 orang	14 orang	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan		7 orang	7 orang	7 orang	100%	7 orang	7 orang	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun		7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi		2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi		4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler yang terpenuhi		8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi		7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang terpenuhi		7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi		5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi		12 bulan			100%			100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran yang terpenuhi		3 orang	3 orang	3 orang		3 orang	3 orang	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemerintahan Daerah	prasarana aparatur								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Prosentase pelaksanaan urusan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Jumlah kegiatan Sarana		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dan Prasarana Pelayanan Umum yang sudah Teraksana								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Presentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN									

	PEMERINTAHAN UMUM									
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terpenuhi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi administrasi pemerintahan desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

		Kepala Desa yang terpenuhi								
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraa n ketentraman dan keteriban umum yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator, yaitu Nilai IKM, Nilai SAKIP, dan Presentase Realisasi SPPT PBB. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana kerja
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
2. Belum maksimal dalam menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten tentang penarikan wewenang perijinan non usaha khususnya IUMK, IMB dan Ho;
4. Pelayanan KK dan KTP terkadang membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini terkait dengan jaringan internet yang terkadang mengalami kendala dan pelayanan di sebenarnya sudah baik, namun demikian masyarakat berharap untuk lebih ditingkatkan lagi;
5. Adanya perubahan mekanisme pelayanan Kependudukan dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Menyesuaian serta merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat;

4. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM		-	84,35	84,36	84,37	84,38	80,53	80,58	84,35	84,36	
2	Nilai SAKIP		-	B	B	B	B	CC	CC	B	B	
3	Persentase Pelunasan PBB							100%	100%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup beberapa urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
4. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
5. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
6. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
4. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
5. Belum optimalnya hasil pekerjaan
6. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja dan ketersediaan sarana dan prasarana .
3. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana prasarana umum dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Tentang Kebijakan dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah
2. Terkait Peralihan Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Terpenuhinya Gaji dan tunjangan ASN, PTT dan THL;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan Mandiraja;

3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mandiraja;
4. Meningkatnya peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Mandiraja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.402.20980 0	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Mandiraja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.252.939.8 00	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	3.495.500	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	Kec. Mandiraja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	3.151.700	

			Perangka t Daerah yang disusun			a Peran gkat daera h		Perangka t Daerah yang disusun			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	8 dokume n	1.699.900	Penyu sunan Doku men Perenc anaan Peran gkat Daera h	Kec. Mandi raja	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	8 dokume n	1.676.100	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian	5 laporan	1.795.600	Koordi nasi dan Penyu sunan Lapor an Capai an Kineja dan Ikhtis ar Realis asi Kinerj a SKPD	Kec. Mandi raja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian	5 laporan	1.475.600	

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.876.604.316	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.881.104.350	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mandiraja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.834.696.316	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mandiraja	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.834.696.350	
b	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	12 dokumen	40.860.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	12 dokumen	45.360.000	

			keuanga n SKPD			kasi Keuan gan SKPD		keuanga n SKPD			
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Sem esteran SKPD	12 Laporan	1.048.000	Koordi nasi dan Penyu sunan Lapor an Keuan gan Bulan an / Triwul anan / Semes teran SKPD	Kec. Mandi raja	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Sem esteran SKPD	12 Laporan	1.048.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Persenta se Administ rasi Umum	100%	158.007.100	Admin istrasi Umum Peran gkat	Kec. Mandi raja	Persenta se Administ rasi Umum	100%	147.999.400	

			Perangka t Daerah yang terlaksan a			Daera h		Perangka t Daerah yang terlaksan a			
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n banguna n Kantor yang Disediak an	1 paket	5.000.000	Penye diaan Komp onen Instala si Listrik /Pene ranga n bangu nan Kantor	Kec. Mandi raja	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n banguna n Kantor yang Disediak an	1 paket	312.500	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 paket	5.499.300	Penye diaan Perala tan dan Perlen gkapa n Kantor	Kec. Mandi raja	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 paket	5.499.300	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Bahan Logistik	7 paket	147.507.800	Penye diaan Bahan Logisti	Kec. Mandi raja	Jumlah Paket Bahan Logistik	7 paket	142.187.600	

			Kantor yang Disediakan			k Kantor		Kantor yang Disediakan			
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	102,554.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	80.000.000	
a.	Pengadaan Mebel	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	13.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
b.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung	3 Paket	19.844.800	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung	-	-	

			kantor/bangunan lainnya			ung gedung kantor/ bangunan lainnya		kantor/bangunan lainnya			
c.	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	
d.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang	3 unit	35.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang	-	-	

			disediakan			lainnya		disediakan			
e.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	
f.	Pengadaan Aset tetap lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	3 unit	4.710.000	Pengadaan Aset tetap lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	-	-	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	108.398,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	108.153,540	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyedia	12 laporan	17.244.860	Penyediaan Jasa	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyedia	12 laporan	17.000.000	

			an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi an			Komu nikasi Sumb er Daya Air dan Listrik		an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi an			
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disedi an	12 laporan	91.153.540	Penye diaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	Kec. Mandi raja	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disedi an	12 laporan	91.153.540	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Kec. Mandiraja	Persenta se Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daerah	100%	153.149.684	Pemeli haraa n Barang Milik Daerah Penun jang Urusa n	Kec. Mandi raja	Persenta se Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daerah	100%	112.530.810	

						Daaer ah					
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kec. Mandiraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	19.720.200	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya Pemeli haraa n, Pajak, dan Perizin an Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan.	Kec. Mandi raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	19.720.200	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar	3 Unit	100.000.884	Pemeli haraa n/ Rehab ilitasi Gedun g Gedun g	Kec. Mandi raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar	3 Unit	68.082.710	

			a/Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		a/Direhabilitasi			
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	33.428.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	24.727,900	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	125.067.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	24.337.900	

						PELAYANAN PUBLIK					
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	5.000.000	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	1 dokumen	5.000.000	

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mandiraja	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	120.067.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mandiraja	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	119.337.900	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang	2000 dokumen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang	2000 dokumen	9.350.000	

			dilaksanakan			terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha		dilaksanakan.			
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 dok	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 dok	620.000	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mandiraja	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di	1 laporan	109.367.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kec. Mandiraja	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di	1 laporan	109.367.900	

			limpahka n			t denga n Kewen angan Lain yang Dilimp ahkan		limpahka n			
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mandiraja	persenta se terlaksa nanya program pemberd ayaan masyara kat dan desa	100%	3.917.800	PROG RAM PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DESA DAN KELU RAHA N	Kec. Mandi raja	persenta se terlaksa nanya program pemberd ayaan masyara kat desa dan keluraha n yang terlaksa na	100%	3.917.800	
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Mandiraja	Persentas e koordinas i Pemberda yaan masyarak at desa	100%	3.917.800	Koordi nasi kegiata n pember dayaan masyar akat desa	Kec. Mandi raja	Persentas e koordinas i Pemberda yaan masyarak at desa	100%	3.917.800	

			yang terlaksana					yang terlaksana			
a.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10 lembaga kemasyarakatan	3.917.800	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Mandiraja	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	12.1015000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	12.1015000	

1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100%	12.1015000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100%	12.1015000	
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12.1015000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12.1015000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mandiraja	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerin	100%	137.703.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS	Kec. Mandiraja	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerin	100%	137.703.000	

			tahan Desa yang terlaksana			AN PEME RINTA HAN DESA		tahan Desa yang terlaksana			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	137.703.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	137.703.000	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	16 dokmen	1.781.500	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	16 dokmen	1.781.500	

			dan Peraturan Kepala Desa					dan Peraturan Kepala Desa			
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	1.335.400	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	1.335.40	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	75.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	75.000.000	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka	16 dokumen	1.435.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka	10 dokumen	1.435.000	

			Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			dan Pendayagunaan Aset Desa		Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 dokumen	5.421.800	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 dokumen	5.421.800	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	16 dokumen	3.384.600	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	16 dokumen	3.384.600	

			Ketenteraman dan Ketertiban Umum			n dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
g.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	16 dokumen	1.630.400	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	16 dokumen	1.630.400	
h.	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di	16 dokumen	47.714.300	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di	16 dokumen	47.714.300	

			wilayahny a					wilayahny a			
	TOTAL				2.681.000.000					2.531.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2022
2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2022
3. Beberapa kegiatan yang belum terdani sepenuhnya agar menjadi prioritas pendanaan dan penambahan pagu anggaran sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Mandiraja melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mandiraja diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Mandiraja. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan" adalah meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan

masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagentan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandiraja sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Tujuan 6: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandiraja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahannya	Nilai SAKIP Kecamatan	B 66	B (66)	B (68)	B (69)	BB (70)
2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,47	84,35	84,36	84,37	84,38

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN / KOTA

Dengan 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3(tiga) Sub Kegiatan :

1. Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Lapangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan :

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 (satu) Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan'

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan :

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan 1 Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 (satu) Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan

Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan :

1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
4. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
5. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
6. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Fasilitas Penyusunan Program Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT MANDIRAJA



ANANG SUTANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19750730 199602 1 002